

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang,

Kota ideal yang di impikan yaitu kota yang aman dan nyaman bagi anak anak, lansia, dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga kota. Kota dengan ruang terbuka sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan lingkungan, kota yang menghargai fasilitas penitipan anak, dan kota yang mendorong tumbuh kembang anak..

Berdasarkan pembahasan di atas, diperlukan suatu rencana atau rancangan untuk merencanakan atau merancang program pembangunan infrastruktur perkotaan secara menyeluruh untuk mendukung program pembangunan daerah yang strategis melalui pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Implementasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan, seperti program kota layak anak.

Ide kota ramah anak (KRA) dikembangkan oleh Kevin Lynch (arsitek di Massachusetts Institute of Technology) yang meneliti tanggapa anak pada lingkungan di beberapa kota seperti : Warsawa, Melbourne, Mexico City, dan Salta antara tahun 1971 hingga 1975. Dalam penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan yaitu lingkungan perkotaan terbaik bagi anak yaitu lingkungan yang menyediakan komunitas social dan fisik yang baik dan tangguh. Komunitas yang tertata dapat mengembangkan kepribadian anak dengan baik.

Penelitian serupa dilakukan oleh Louise Chawla 1995, Program Anak dan Lingkungan, Pusat Penelitian Anak Norwegia - Trondheim, Norwegia; Studi ini didukung oleh UNESCO dan implementasikan eropa dan amerika latin serta afrika dan australia juga Rusia dan Amerika. Temuan ini dapat dipandang sebagai bagian dari indicator UNICEF untuk memantau pelaksanaan hak-hak anak di kota dalam kerangka Inisiatif Kota Ramah Anak bagi pemerintah kota.

Komitmen para walikota pada Sidang Umum Khusus PBB tentang Anak-anak pada pertengahan tahun 2002, mereka mendukung untuk mempromosikan hak anak. Pada kesempatan itu ereka juga membuat gerakan massif terhadap seluruh walikota di dunia agar membuat aksi dikotanya, sebagai bagian dari kegiatan membangun

sebuah kota yang ramah untuk anak. Tiap kota besar hendaknya menjadi sebuah aksi perubahan dan agen perubahan bagi kota-kota disekitarnya.

Konferensi tingkat tinggi mengenai *sustainable development* yang diadakan di salah satu kota di Afrika Selatan pada tahun 2002, para pemimpin dunia sepakat, antara lain, untuk memastikan bahwa setidaknya 100 juta orang tinggal di daerah miskin, melalui rekomendasi "Kota Bebas Kumuh" dengan meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan melalui Inisiatif 2020 (Kota Bebas Kumuh).

Proses pembangunan harus memperhatikan peran anak sebagai pemimpin masa depan negara. Diharapkan anak memiliki peran di pada tiap tahap proses pembangunan dan sejauh mana anak terlibat dalam proses ini. Anak mempunyai posisi penting dalam menjamin keberkelanjutan kota (Haq 2017). Kelalaian kota terhadap hak anak tidak hanya disebabkan oleh regulasi dan minimnya persediaan dana, tetapi juga sarana dan prasarana kota yang turut berperan dalam penyediaan fasilitas berkembang anak dengan wajar

Ketenangan dan kenyamanan pada sekitar perumahan, aktifitas publik lainnya dapat mengungkapkan perasaan anak yang terfasilitasi oleh berbagai layanan social yang pada akhirnya dapat memberikan perasaan positif dan bebas dari gangguan fisik dan mental yang mungkin dialami anak. Kebiasaan warga kota yang membuang sampah sembarangan, di sungai atau selokan dapat menimbulkan penumpukan sampah dan meluapnya air saat hujan, akibatnya jalanan tergenang dan rusak, pada gilirannya memunculkan berbagai penyakit baik penyakit saluran pernapasan, penyakit kulit dan gangguan kesehatan lainnya. Ini membuktikan bahwa Sedikitnya perhatian negara terhadap hak berkembangnya anak (Fitriani 2016).

Kota Tangerang selatan sebagai daerah penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki karakteristik kota yang sama dengan ibu kota, infrastruktur kota, akses transportasi, pemukiman, pendidikan dan pusat bisnis perkantoran. Dari segi tingginya jumlah penduduk per km² berdasarkan data BPS tahun 2022 Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah penduduk 1.3 juta jiwa dengan memiliki kepadatan penduduk rata-rata 8.284 jiwa/km² yaitu pertumbuhan penduduk sebesar 0.47 % dengan konsentrasi terbesar pada kecamatan Pamulang sebesar 10.724 jiwa/km², sedangkan Jakarta dengan jumlah penduduk 10,64 juta jiwa memiliki

kepadatan penduduk rata rata 16.125 jiwa/km² dengan konsentrasi kepadatan penduduk terbesar pada Jakarta Pusat sebesar 22.439 jiwa/km².

Dengan munculnya kota-kota global seperti Manila di Filipina, yang memelopori kota ramah anak, program kota ramah anak didirikan di 20 provinsi dan lima kota pada tahun 1999: Kota Pasay, Manila, Kota Quezon, Kota Cebu, dan Kota Davao. Program ini memulai penelitian mengenai penderitaan anak-anak perkotaan di empat kota antara tahun 1990 dan 1992, Pemerintah Kota Queensland membentuk Komisi Anak dan Pemuda pada tahun 2000. Sebuah program yang berfokus pada Program Aksi Perkotaan untuk Anak Jalanan dan Pekerja (CLPOA) dilaksanakan di Kolkata, India. Kegiatan CLPOA melayani layanan kebutuhan dasar masyarakat seperti hukum, Pendidikan dan lain lain. Sasaran kegiatan ini adalah pekerja anak, prostitusi, perdagangan dan bentuk eksploitasi lainnya.

Sasaran utama Kota Porto Alegre memberikan porsi yang besar pada keterlibatan warga dalam menentukan dan menyusun biaya. Angka kematian berhasil ditekan dari 20 menjadi 12 perkapita dan tersosialisaikan secara nasional dan internasional dengan predikat kota yang memiliki kualitas pelayanan anak yang baik. Tahun (2002), proses partisipasi penganggaran sukses diimplementasikan dengan partisipasi 10.000.000a penduduk perkotaan di hamper 500 kota.

RTP Kota Tangsel, khususnya Community Center, adalah pusat komunitas dengan taman sebagai RTH, fasilitas bermain anak, olahraga dan hobi lainnya sehingga muncul komunitas komunitas olahraga dan edukasi lainnya, dimana warga dating tidak hanya dari Tangsel akan tetapi juga dari kota terdekat seperti Depok dan Kota Tangerang. Pusat komunitas memiliki daya tarik tersendiri dan layak dikunjungi siang atau malam. Sebagiannya berupa area terbuka berupa padang rumput hijau yang dikelilingi pepohonan rindang. *Community Centre* merupakan Ruang terbuka publik yang dapat membantu memberikan solusi untuk mengurangi penurunan kualitas lingkungan perkotaan di Kota Tangsel. Sesuai dengan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variable variable community center sebagai ruang terbuka hijau, kota ramah anak dan standar Sustainable Development goals sudah dipenuhi indicator indikatornya.

Beberapa alasan yang mendasari penelitian ini adalah 4.8 milyar dari 8 milyar penduduk dunia tinggal dikota, 56% di tahun 2022. Dan 26.1% dari jumlah ini atau 1.25milyar adalah anak-anak antara 0-15 tahun [1] world population prospect 2022, Divisi Kependudukan Departemen Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN DESA) 2020, Kondisi permukiman yang buruk di kota-kota negara sedang berkembang mengakibatkan banyak anak terjangkit penyakit dan tingginya tingkat kematian anak [2] WHO 2021 angka kematian dibawah 15 tahun mencapai 5.2 juta anak pertahun atau 14000 anak perhari, Kurangnya perhatian pemerintah terhadap hak berkembang anak ditandai oleh keterbatasan akses anak dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya (Paramitha and Anggara 2018).

Gambaran yang menarik dari penelitian ini adalah Pengabaian terhadap hak berkembang anak di kota mengakibatkan terhambatnya tumbuh kembangnya anak. Contoh: kurangnya penyediaan sarana dan prasarana anak di dalam kota dan kurangnya perhatian penyediaan fasilitas anak dalam community centre di tiap kecamatan (Rahmiati and Prihastomo 2018). Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Target, yaitu kota berkelanjutan dan mobilisasi komunitas (Memobilisasi Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan) menyebutkan beberapa standar pemenuhan hak berkembang anak. Dan kurangnya Arsitek dan perencana kota di Indonesia dalam memberikan perhatian dan membahas masalah hak berkembang anak (Iqbal, Pradana, and Harshinta 2022).

Dari segi arsitektural, perencanaan kota yang dapat menyediakan tempat nyaman bagi warga terutama anak-anak membutuhkan proses yang panjang dalam penggalian informasi dan referensi dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dan evaluasi, sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Hendaknya pemerintah tidak menguasai semua proses perencanaannya. Menggunakan tahapan pendekatan *bottom-up* tentunya lebih baik daripada pendekatan *top-down* dalam menentukan kebutuhan. Demikian pula, masyarakat akan terus dilibatkan pada tahap berikutnya untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap proses tersebut.

Sistem infrastruktur terutama mendukung berlangsungnya kegiatan sosial dan perkembangan ekonomi dalam kehidupan kota. Salah satu program infrastruktur perkotaan yang penting adalah Ruang Terbuka Publik (RTP).

Ruang Terbuka Publik (RTP) yang Berkualitas meliputi kawasan yang dirancang memiliki area yang memberikan kenyamanan dan memfasilitasi kehidupan sosial kota yang kompleks dan kreatif. RTP dapat menyampaikan nama dan identitas suatu kota serta mencerminkan kekhasan suatu masyarakat.

RTP adalah sekelompok orang yang tidak dibatasi oleh siapapun, dan ruang merupakan formasi tiga dimensi yang diciptakan oleh elemen-elemen yang membatasinya (Francis D.K. Ching 2008). Pusat kawasan olah raga dengan variasi vegetasi dan rindangnya pepohonan peneduh sebagai penghasil oksigen adalah sebuah cara dalam memberika fungsi optimal pada RTP berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah kota serta kondisi alam masing masing daerah. Menurut (Haryanti 2008) pembangunan kota hijau erat kaitannya dengan istilah infrastruktur kota hijau .

Upaya pemerintah kota dalam menerapkan RTP hanya fokus pada luas (kuantitas) lahan untuk memenuhi peraturan, tanpa mempertimbangkan fungsi (kualitas) RTP. RTP biasanya difungsikan sebagai wahana pertemuan komunitas dan dapat menjaga kualitas kota serta mewadahi berbagai kegiatan komunitas yang berlangsung dalam sebuah area yang cakupannya dapat sangat luas, meliputi suatu kawasan kota..

Menurut (Carmona 2003) ada empat elemen ruang publik yang berkualitas., yaitu:

1. Nyaman/Perwajahan (citra).
2. Ketercapaian /minat.
3. Pemakai fasilitas/wadah aktifitas
4. Kapasitas penyerapan sosial.

Komponen tersebut diatas terkait pada sifat sarana dan manfaat RTP. Aspek RTP dapat memiliki kepuasan dengan beberapa aspek, salah satunya adalah aspek penunjang dari komponen yang termasuk dalam RTP, dan aspek fungsional terkait jumlah pengguna ruang dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

Ruang public sebagai bagian dari pelayanan sosial kota seharusnya dapat dinikmati oleh semua kalangan baik orang lansia, orang tua, muda anak anak dan juga orang berkebutuhan khusus. Pada penelitian ini difokuskan pada penggunaan RTP sesuai pedoman standar Kota Layak Anak (KLA) Republik Indonesia.

1.2 Batasan Masalah

Fokus penelitian akan difokuskan pada pemenuhan standar kota ramah anak di ruang terbuka publik, terutama di Community Centre Pamulang. Hal ini mencakup penilaian terhadap aspek fisik, fasilitas, dan layanan yang berkaitan dengan keberlanjutan ruang terbuka publik yang ramah anak serta pemenuhan *Sustainable Development Goals* 30 khususnya Tujuan ke 11 mengenai pemukiman.

1.3 Rumusan masalah

1. Bagaimana kondisi kota Tangerang Selatan terhadap konsep Kota ramah Anak (hak berkembang anak)
2. Apakah kota Tangerang Selatan sudah memenuhi standar SDGs 30?
3. Bagaimana peran arsitek di Kota Tangsel dalam memenuhi standar kota ramah anak ?

1.4 Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar balik permasalahan serta informasi dini yang ditemui, bisa diidentifikasi permasalahan dalam riset ini, antara lain:

- A. Masih kurangnya perencanaan kota yang memperhatikan konsep ramah anak dalam setiap perencanaan dan pembangunannya
- B. Masih minimnya perencanaan kota yang memperhatikan dan melaksanakan standar kota berkelanjutan seperti yang disebutkan dalam standar sustainable development goals (SDGs 30) No 11 ialah kota serta pemukiman yang dalam jangka panjang dengan mewujudkan kota- kota serta permukiman yang inklusif, nyaman, tangguh.
- C. Kurangnya perencanaan kota yang menyediakan fasilitas kebutuhan anak dalam mengembangkan kemandiriannya

1.5. Tujuan penelitian

1. Menguraikan dan menganalisis bagaimana kondisi kota Tangerang selatan terhadap konsep kota ramah.
2. Menguraikan dan menganalisis apakah kota Tangerang selatan sudah memenuhi standar SDGs 30?
3. Menguraikan dan menganalisis pagaimana peran arsitek di Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi standar kota ramah anak

1.6 Manfaat Kajian

Penelitian secara teori ini sebagai penambahan literatur , pengembangan keilmuan di bidang arsitektur khususnya kota ramah anak studi kasus Community Center Pamulang dan standar pemenuhan SDGs 30

Secara praktis dapat dijadikan acuan pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan memelalui pemecahan masalah sosial, penelitian dapat memberikan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih akurat Mencari dan Menemukan solusi terhadap permasalahan Ruang Terbuka Publik berdasarkan standar kota ramah anak dan standar SDGs 30

1.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan riset, lingkup riset, kebermanfaatan riset serta sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teori serupa atau riset sebelumnya yang berkaitan dengan ruang terbuka publik dalam konteks kota ramah anak.

BAB III Metode Penelitian

Dijabarkan cara merumuskan permasalahan dan menjawab cara-cara serta langkah yang diperlukan dalam menguraikan dan menganalisa terhadap pertanyaan riset

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi kajian terhadap ruang terbuka publik kaitannya dengan kota ramah anak pada community centre Pamulang Kota Tangerang Selatan

BAB V Kesimpulan.

Kesimpulan terhadap hasil pembahasan dan saran pemecahan permasalahan terhadap ruang terbuka publik kaitannya dengan kota ramah anak pada community centre Pamulang

Bibliografi (Daftar Referensi)